

PERALIHAN KE EKONOMI HIJAU SETELAH COVID-19

Toolkit for Parliamentarians



ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS



Hanns
Seidel
Foundation



PELUANG “MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH BAIK”

Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang mengikutinya telah mengungkap kegagalan dan kerapuhan sistem ekonomi kita, yang memprioritaskan kepentingan bisnis di atas rakyat dan lingkungan, memperdalam kesenjangan, dan gagal melindungi yang paling rentan.

Untuk pulih dari resesi akibat pandemi, negara-negara kini mengadopsi berbagai langkah pemulihan guna meningkatkan perekonomian mereka. Jenis model ekonomi yang akan didukung oleh langkah-langkah ini sangat penting dalam membentuk masa depan kita, dan momen ini menghadirkan peluang ideal untuk melepaskan diri dari masa lalu dan beralih ke ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Beralih ke arah perekonomian yang lebih hijau adalah bagian penting dari **“membangun kembali dengan lebih baik.”**

Suatu pemulihan hijau adalah penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membantu mengurangi pemanasan global.

Langkah-langkah yang fokus pada perubahan dari industri yang bergantung pada bahan bakar fosil (seperti minyak, batu bara, dan gas) dan alih-alih menuju pengembangan energi bersih dan terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, angin, dan tenaga air.

MANFAAT DARI PEMULIHAN HIJAU



Membatasi pemanasan global

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan di dunia yang paling mudah terdampak oleh perubahan iklim, yang mengancam akses ke pangan, air, dan aneka sumber daya alam lainnya, serta kemungkinan timbulnya konflik, kemiskinan dan pandemi yang lebih parah.

Kerangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN (The ASEAN Comprehensive Recovery Framework) mengakui bahwa *"perubahan iklim merupakan risiko fundamental bagi ASEAN,"* dan bahwa *"berbagai tindakan untuk memitigasi dampak-dampak perubahan iklim harus segera diambil."*

Dengan semakin sempitnya waktu yang ada untuk mempertahankan pemanasan global di bawah 1,5oC, sebagaimana disepakati dalam Persetujuan Paris, adalah hal yang menentukan untuk dengan segera mendorong kebijakan-kebijakan demi suatu pemulihan hijau.



Membangun perekonomian yang lebih cepat pulih dan lebih tangguh

- Dengan menjaga suhu global jauh di bawah 2o C, para pakar mengalkulasi ASEAN dapat terhindar dari penurunan **25% PDB**-nya di akhir abad ini.
- Menggunakan dana pemulihan COVID-19 untuk memitigasi risiko-risiko iklim dapat mencegah kenaikan utang secara tidak berkelanjutan di kawasan ini ketika berhadapan dengan berbagai krisis akibat perubahan iklim seperti topan, pandemi, banjir.
- Bank Pembangunan Asia (ADB) mengestimasi bahwa belanja modal sebesar 172 miliar dollar AS pada bidang-bidang kunci yang ramah iklim, semacam energi bersih, dapat menciptakan 30 juta pekerjaan di Asia Tenggara pada 2030.

LANGKAH-LANGKAH MEMPROMOSIKAN PEMULIHAN HIJAU



Subsidi pemerintah atau pengurangan pajak untuk produk ramah lingkungan: Indonesia dan Filipina telah menetapkan pengurangan pajak untuk industri dan UKM yang mengadopsi proyek energi terbarukan.



Kenaikan pajak untuk produk yang berbahaya bagi lingkungan: Singapura diperkirakan akan menaikkan tarif pajak bahan bakar hingga 15% per liter sebagai bagian dari dukungannya terhadap kendaraan listrik.



Investasi pada infrastruktur energi bersih: Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat produksi energi surya seperti pemasangan panel surya di atap, lampu jalan LED, dan jalur transmisi.



Investasi pada infrastruktur transportasi bersih: Filipina mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan trotoar yang dapat diakses dan jalur sepeda yang dilindungi.



Insentif untuk kendaraan listrik: Singapura memberlakukan potongan harga pada pendaftaran dan pajak jalan untuk pemilik kendaraan listrik selama pandemi.



Insentif untuk energi bersih dan peralatan listrik hemat energi: Singapura menyediakan voucher rumah tangga untuk peralatan hemat energi dan air, seperti lemari es ramah iklim, perlengkapan mandi hemat air, dan lampu LED.



Dukungan untuk peningkatan kualitas gedung dan perumahan hijau baru: Singapura berencana untuk meningkatkan kinerja energi minimum bangunan baru dan yang sudah ada sehingga setidaknya 80% bangunan Singapura akan dihijaukan pada tahun 2030.



Pendanaan penelitian dan pengembangan (litbang) bersih: Thailand menyetujui proyek senilai lebih dari USD 1 miliar untuk rantai pasokan, penelitian, dan pengembangan kendaraan listrik.



Investasi infrastruktur alamiah dan ruang hijau: Singapura mencurahkan sumber daya untuk memperbaiki mutu lanskap alami negara.



Pelatihan ulang pekerja ramah lingkungan dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan: Tidak ada contoh dari Asia Tenggara tetapi Pakistan menyetujui Stimulus Hijau untuk orang muda yang menganggur, perempuan, dan pekerja harian untuk mendapat penghasilan dari campur tangan berbasis alam seperti: menanam pohon, meningkatkan perlindungan hutan alam, dan perbaikan sanitasi air.



Dukungan bersyarat dari pemerintah untuk bisnis yang menimbulkan polusi dengan ikatan hijau: Tidak ada contoh dari Asia Tenggara tetapi Prancis yang memuat persyaratan dalam paket penyelamatan Air France seperti: mengurangi separuh emisi CO2 per penumpang per kilometer pada 2030 dan mengurangi separuh emisi domestik di akhir 2024.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIHINDARI KARENA BERKONTRIBUSI TERHADAP PEMANASAN GLOBAL MELIPUTI:



Dukungan untuk bisnis yang mencemari tanpa ikatan hijau atau kebutuhan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah iklim: Indonesia memberikan suntikan modal negara kepada PT Pertamina (minyak & gas), Garuda Indonesia (penerbangan), dan PLN (listrik), dengan total lebih dari USD 6,29 miliar tanpa persyaratan.



Memberikan subsidi atau pembebasan biaya untuk industri yang merusak lingkungan: Indonesia memberikan diskon bahan bakar jet senilai 2 juta dollar AS untuk maskapai penerbangan di sembilan bandara.



Memberikan subsidi atau pengurangan pajak untuk produk-produk yang merusak lingkungan: Indonesia menurunkan harga listrik domestik yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil dan gas industri.



Deregulasi standar-standar lingkungan: Filipina mencabut larangan tambang mineral baru di bawah Perintah Eksekutif 130.

APA YANG BISA DILAKUKAN ANGGOTA PARLEMEN?

-  Memanfaatkan laporan APHR “Membangun Kembali Lebih Baik”: Transisi Asia Tenggara ke ekonomi hijau setelah COVID-19” untuk mempromosikan penerapan kebijakan pemulihan hijau yang disebutkan di atas.
-  Mendesak pemerintah Anda untuk menyerahkan target NDC yang lebih ambisius ke Perjanjian Paris.
-  Memprioritaskan alokasi anggaran untuk energi terbarukan, transportasi umum, efisiensi energi, kendaraan listrik, dan bidang utama ekonomi rendah karbon lainnya.
-  Mempromosikan investasi infrastruktur alami dan ruang hijau untuk mencegah potensi kerusakan akibat bencana terkait iklim seperti banjir.
-  Secara terbuka menaikkan biaya-biaya lingkungan dan hak asasi manusia bagi pembangunan yang melibatkan batu bara dan berbagai kebijakan lain yang merusak lingkungan.
-  Mempromosikan partisipasi masyarakat secara berarti untuk memastikan pemulihan hijau yang mendukung hak asasi orang-perorang.
-  Bertemu dengan konstituen untuk memahami masalah iklim mereka yang paling mendesak, dan menyampaikannya kepada pemerintah.
-  Memanfaatkan komisi dan pembahasan di parlemen untuk mengarusutamakan isu iklim dan manfaat ekonomi hijau.

Untuk rekomendasi khusus negara klik di sini: [Indonesia](#), [Malaysia](#), [Filipina](#), [Singapura](#), [Thailand](#), dan [Timor-Leste](#).

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT:



- [Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Transisi Asia Tenggara ke arah perekonomian hijau selepas COVID-19.](#)
- [Tanggapan Ekonomi COVID-19: Manifesto Para ANGGOTA Parlemen.](#)
- Silakan menghubungi: info@aseanmp.org



**ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS**

SEPTEMBER 2021



**Hanns
Seidel
Foundation**